



DAMPAK REKLAMASI PANTAI BOULEVARD TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA NELAYAN DI KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA

The Impact of Boulevard Beach Reclamation on The Welfare of Fishermen Household In Manado City of North Sulawesi Province

Dahyar Daraba*, Ribka Christy, Clara Saroinsong,

Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor

ARTIKEL INFO

* Corresponding author;
dahyardaraba@ipdn.ac.id

Kata Kunci:

harapan;
kesejahteraan;
nelayan;
reklamasi;

Key Word:

hope;
well-being;
fishermen;
reclamation;

doi:.....

ABSTRAK/ ABSTRACT

Pembangunan reklamasi pantai diharapkan mampu memenuhi kebutuhan daerah serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis dampak reklamasi pantai Boulevard terhadap kesejahteraan rumah tangga nelayan di kota Manado, untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah menganggapi pola perubahan pekerjaan nelayan akibat reklamasi pantai, untuk mengetahui harapan nelayan terhadap reklamasi pantai Boulevard. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan ruang lingkup penelitian yakni jaminan social, kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan social, ketenagakerjaan, ekonomi masyarakat, rekreasi, spiritualitas dan lingkungan hidup. Adapun informan sebanyak 19 orang, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan yakni triangulasi. Sedangkan teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan di Kota Manado cukup baik, adanya kawasan reklamasi sebagai pusat perdagangan memberikan peluang kepada masyarakat untuk berinovasi dalam dunia perdagangan dan pemerintah lebih memperhatikan masyarakat nelayan sebagai pihak yang paling merasakan dampak reklamasi

The development of coastal reclamation is expected to be able to meet the needs of the region and be able to answer the problems of regional development in increasing economic growth for the welfare of the community. responding to the changing pattern of fishermen's work due to beach reclassification, to find out the expectations for the beach reclamation Boulevard. The research method used is descriptive qualitative research method with the scope of research that is social security, health, education, housing, social work, employment, community economy, recreation, spirituality and the environment. The informants were 19 people, with interview, observation and documentation data collection techniques. The data validity technique used is triangulation. While the data analysis techniques are data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of research on the level of welfare of fishermen households in the city of Manado is quite good, the existence of the reclamation area as a trade center provides opportunities for the community to innovate in the world of trade and the government pays more attention to the fishing community as the party that feels the reclamation most

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dengan asas otonomi daerah telah menghadirkan optimisme daerah untuk dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan daerah menuju keadaan yang lebih baik. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan harapan tersebut adalah dengan memahami dan mengoptimalkan potensi daerah melalui pembangunan (Farida, 2017; Kadji, 2015; Prasodjo, 2016; Samsir et al., 2017; Wenda & Akib, 2015). Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan secara luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga tahap evaluasi.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus dilakukan di segala bidang kehidupan yang didambakan dan diarahkan pada pengembangan potensi, inisiatif, daya kreasi, dan kepribadian dari setiap warga masyarakat (Anandita et al., 2013; Deviyanti, 2013; Sari & Ibrahim, 2009). Pembangunan daerah merupakan serangkaian usaha sadar yang dilakukan oleh daerah dalam rangka pencapaian tujuan melalui optimalisasi potensi sumberdaya yang dimiliki. Dengan adanya pembangunan terhadap suatu kota, dapat memacu pertumbuhan ekonomi terhadap kota tersebut. Sebagai dampaknya, kota tersebut akan menjadi magnet bagi penduduk untuk berdatangan mencari pekerjaan dan bertempat tinggal. Inilah salah satu faktor yang mendorong terjadinya urbanisasi. Namun apabila urbanisasi dari desa kota berlangsung secara terus menerus maka akan terjadi ledakan penduduk di kota tersebut (Suharso, 2014; "Urbanisasi Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan," 2012).

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi "nilai" wilayah pesisir terus bertambah. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan lahan sebagai suatu faktor alam yang tak dapat diperbaharui, maka dicarilah alternatif melalui pengembangan lahan baru yakni melalui kegiatan reklamasi pantai yang dapat menopang perluasan kesempatan kerja. Berdasarkan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil), reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara

pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Pembangunan reklamasi pantai diharapkan mampu memenuhi kebutuhan daerah serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut ditandai dengan munculnya program pemerintah kota dengan mereklamasi pantai Boulevard Kawasan Bahu, Kota Manado. Akibat reklamasi sebagian besar nelayan terpaksa harus kehilangan pekerjaannya karena lokasi yang disisakan untuk dijadikan tambatan perahu hanya seluas 40x150 meter selain itu nelayan terpaksa harus beralih profesi.

METODE

Penyelenggaraan pemerintahan dengan asas otonomi daerah telah menghadirkan optimisme daerah untuk dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan daerah menuju keadaan yang lebih baik. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan harapan tersebut adalah dengan memahami dan mengoptimalkan potensi daerah melalui pembangunan (Farida, 2017; Kadji, 2015; Prasodjo, 2016; Samsir et al., 2017; Wenda & Akib, 2015). Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan secara luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga tahap evaluasi.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus dilakukan di segala bidang kehidupan yang didambakan dan diarahkan pada pengembangan potensi, inisiatif, daya kreasi, dan kepribadian dari setiap warga masyarakat (Anandita et al., 2013; Deviyanti, 2013; Sari & Ibrahim, 2009). Pembangunan daerah merupakan serangkaian usaha sadar yang dilakukan oleh daerah dalam rangka pencapaian tujuan melalui optimalisasi potensi sumberdaya yang dimiliki. Dengan adanya pembangunan terhadap suatu kota, dapat memacu pertumbuhan ekonomi terhadap kota tersebut. Sebagai dampaknya, kota tersebut akan menjadi magnet bagi penduduk untuk berdatangan mencari pekerjaan dan bertempat tinggal. Inilah salah satu faktor yang mendorong terjadinya urbanisasi. Namun apabila urbanisasi dari desa kota berlangsung secara terus menerus maka akan terjadi ledakan penduduk di kota tersebut (Suharso, 2014; "Urbanisasi Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan," 2012).

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi "nilai" wilayah pesisir terus bertambah. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan lahan sebagai suatu faktor alam yang tak dapat diperbaharui, maka dicarilah alternatif melalui pengembangan lahan baru yakni melalui kegiatan reklamasi pantai yang dapat menopang perluasan kesempatan kerja. Berdasarkan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil), reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Pembangunan reklamasi pantai diharapkan mampu memenuhi kebutuhan daerah serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut ditandai dengan munculnya program pemerintah kota dengan mereklamasi pantai Boulevard Kawasan Bahu, Kota Manado. Akibat reklamasi sebagian besar nelayan terpaksa harus kehilangan pekerjaannya karena lokasi yang disisakan untuk dijadikan tambatan perahu hanya seluas 40x150 meter selain itu nelayan terpaksa harus beralih profesi.

HASIL DAN DISKUSI

Pembangunan reklamasi pantai Boulevard pada hakekatnya merupakan kebijakan pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat melalui potensi yang ada. Nelayan, yang merupakan pihak yang terkena dampak langsung atas reklamasi pantai karena pantai merupakan tempat dimana nelayan meletakkan perahu sebagai sarana untuk mencari ikan di laut dan sebagian besar nelayan tinggal di pesisir pantai.

Dampak Reklamasi Pantai Boulevard terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Kota Manado

Berdasarkan teori dari (Adi, 2013) sebagai parameter kesejahteraan sosial untuk mengukur dan menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Parameter tersebut terdiri dari 10 indikator yakni ekonomi masyarakat, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan sosial, rekreasi, spiritualitas, lingkungan hidup jaminan sosial.

a. Ekonomi

Sebagaimana tujuan pemerintah dalam pembangunan sub sektor perikanan bermuara pada

satu tujuan yaitu peningkatan taraf hidup. Berdasarkan hasil wawancara di beberapa Daseng yang dimiliki oleh nelayan yang berdomisili di Kecamatan Sario yakni kelompok Tarusi, Firdaus dan Daseng Sekretariat ANTRA mengatakan bahwa penghasilan nelayan dari hasil melaut adalah sekitar Rp 150.000/hari, jika ditotalkan per bulan sekitar Rp 3.000.000 dengan masa kerja 20 hari per bulan tergantung kondisi cuaca. Apabila cuaca sedang dalam keadaan baik sehingga memungkinkan nelayan untuk sering mencari ikan di laut penghasilan bisa bertambah, namun apabila cuaca buruk, penghasilan akan kurang dari Rp 3.000.000.

Sebelum dan sesudah reklamasi pendapatan nelayan tidak jauh berbeda. Sebelum adanya reklamasi ikan memang mudah didapat, tak membutuhkan jarak yang terlalu jauh bagi para nelayan untuk melaut, namun pada masa itu harga ikan di pasaran tergolong murah. Sebaliknya pada era reklamasi pantai, cukup sulit mendapatkan ikan namun harga ikan di pasaran cukup tinggi sehingga walaupun ikan sedikit nelayan mampu meraup untung yang cukup banyak oleh karena harga ikan yang cukup mahal dibanding sebelumnya.

b. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah, masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Berbagai masalah bidang ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah antara lain tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak (Badan Pusat Statistik, 2015)

Adanya reklamasi Pantai Boulevard yang menjadikan Kawasan Reklamasi tersebut sebagai pusat perekonomian dan bisnis di Provinsi Sulawesi Utara memberikan kesempatan kerja yang besar kepada masyarakat kota Manado, termasuk keluarga nelayan di Kota Manado. Ikan yang pada awalnya hanya dijual secara mentah kini diolah menjadi beberapa produk seperti rica roa, ikan fufu, ikan kaleng dan sebagainya yang dijual di pasar, toko-toko maupun restoran yang berada di kawasan reklamasi.

c. Kesehatan

Pada masyarakat nelayan, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam menunjang keberhasilan sebagai nelayan. Hal ini disebabkan karena apabila seorang nelayan sakit

maka nelayan tersebut tidak akan bisa menghasilkan hasil yang maksimal, sebaliknya jika nelayan tersebut sehat maka ia bisa mencapai hasil yang maksimal. Untuk menciptakan keadaan yang sehat maka masyarakat harus memperhatikan kondisi lingkungan, penggunaan air bersih, dan makanan bergizi. Berdasarkan hasil penelitian Secara umum dapat dikatakan bahwa kualitas udara Kota Manado berada pada status baik mengingat tidak ada satupun parameter melebihi baku mutu yang dipersyaratkan dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara). Kondisi air pada masyarakat nelayan harus diangkut dari kawasan pemukiman kemudian dibawa masyarakat. Padahal masyarakat sudah melakukan pengajuan terhadap pemerintah kota untuk pengaliran air ke daseng, namun hal tersebut belum mendapatkan tanggapan dari pihak terkait.

d. Pendidikan

Pendidikan dapat membantu nelayan untuk menyerap dan menggunakan teknologi baru, mengadakan adaptasi teknologi untuk mengembangkan teknologi tepat guna. Karena itu, pendidikan dapat merubah sikap dan cara berpikir nelayan untuk menjadi terampil dan ahli. Berdasarkan hasil wawancara yang ditinjau kembali dengan menggunakan data sekunder melalui peninjauan kartu nelayan yang bersumber dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan bahwa pendidikan nelayan masih tergolong rendah, dilihat dari banyaknya narasumber yang menamatkan riwayat pendidikannya sebagian tidak memenuhi persyaratan wajib belajar 12 tahun. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat pendidikan nelayan di Kota Manado belum cukup baik, walaupun ada 1 orang dari informan yang menamatkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi, namun jika diambil jumlah terbesarnya pendidikan nelayan sebagian besar masih rendah. Gambar di atas menunjukkan posisi terbanyak pertama berada pada tingkat pendidikan SMA/ sederajat, yaitu berjumlah 6 orang (40%) dan SMP berjumlah yang sama yakni 6 orang (40%). Untuk tamatan SD narasumber hanya berjumlah 1 orang (6,7%) serta 1 orang berpendidikan S1 (6,7%).

e. Perumahan

Salah satu kualitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah adalah kualitas material seperti jenis lantai dan dinding yang digunakan, termasuk fasilitas penunjang lain yang fasilitas tempat buang air besar. Rumah tinggal dikategorikan sebagai rumah layak huni apabila sudah memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tinggal tersebut.

Dari hasil wawancara, bahwa kondisi perumahan nelayan di Kota Manado cukup baik. Hal ini terjadi karena adanya desakan lingkungan dimana Kecamatan Sario merupakan kecamatan yang berada di perkotaan sehingga masyarakat nelayan mulai memprioritaskan perumahan dalam kebutuhan.

f. Pekerjaan sosial

Pekerjaan sosial ini peneliti artikan sebagai keikutsertaan nelayan terhadap kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di kelurahan dan lingkungan tempat tinggal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti memperoleh informasi dari narasumber bahwa nelayan di kecamatan Sario aktif mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan seperti rapat di kelurahan, kerja bakti (gotong royong) dan sebagainya.

Berdasarkan jawaban kedua informan di atas mengenai dimensi Pekerjaan Sosial, dapat disimpulkan bahwa masyarakat nelayan aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan sosial lainnya. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat nelayan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial dapat menggambarkan bahwa kehidupan keluarga nelayan yang sudah cukup sejahtera karena sudah mampu memenuhi kebutuhan orang lain baik secara materiil maupun moril.

g. Rekreasional

Rumah tangga nelayan dapat dikatakan sejahtera apabila telah memenuhi indikator yakni rekreasional, dalam hal ini yang dimaksud dengan rekreasional adalah rumah tangga nelayan mempunyai waktu dan kesempatan untuk berekreasi. Berdasarkan hasil wawancara bahwa indikator rekreasional di lingkungan nelayan dan keluarga sudah cukup baik. Lokasi tempat tinggal keluarga nelayan yang berada di perkotaan sangat memungkinkan untuk berekreasi. Fasilitas rekreasi mulai dari rekreasi alam sampai rekreasi buatan tersedia di Kota Manado. Dapat di katakan bahwa kebutuhan rekreasi di lingkungan rumah tangga nelayan cukup baik.

h. Spiritualitas

Spiritual yang baik akan membawa dampak positif bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Spiritual yang baik akan memberi gambaran tentang kesejahteraan rumah tangga nelayan. Berdasarkan hasil penelitian, dimensi spiritualitas dapat disimpulkan bahwa kondisi spiritual keluarga nelayan sudah baik. Hal ini didorong oleh kewajiban warga Negara Indonesia untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta faktor lingkungan perkotaan yang menjadikan

masyarakat nelayan tidak lagi memiliki kepercayaan seperti animisme dan sebagainya.

i. Lingkungan hidup

Kota Manado dikelilingi oleh perbukitan dan barisan pegunungan. Secara umum kehidupan di Kota Manado sama dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Pusat kota terdapat di kawasan reklamasi pantai yang banyak dibangun pusat-pusat pembelanjaan yang terletak di sepanjang jalur utara-selatan yang juga dikenal dengan tempat yang memiliki restoran-restoran terkenal di Manado. Akhir-akhir ini Manado terkenal dengan makin menjamurnya mall-mall dan restoran-restoran yang dibangun di sepanjang pantai yang memanfaatkan pemandangannya yang indah di saat menjelang matahari terbenam.

Pembangunan Kota Manado saat ini ditandai dengan adanya pusat-pusat bisnis dengan dampak positif dan negatif diantaranya adalah dengan adanya pusat-pusat bisnis ini dapat menyebarkan penduduk kota Manado. Penduduk kota tidak lagi menumpuk di satu titik seperti di pasar 45, tetapi tersebar di beberapa wilayah kecamatan di kota Manado. Perairan Pantai Teluk Manado pun ikut berubah dari ekosistem perairan menjadi ekosistem daratan. Reklamasi pinggir pantai semakin tertata dan layak serta tidak lagi menjadi tempat pembuangan sampah-sampah. Namun tidak semua kalangan masyarakat yang hidup di Kota Manado dapat menikmati semua itu dengan baik, karena sebagian fasilitas hanya akan menjangkau kalangan masyarakat menengah ke atas.

j. Jaminan sosial

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat termasuk para nelayan. Jaminan sosial disini diukur dengan ada tidaknya asuransi sosial yang dimiliki masyarakat nelayan. Melalui pemerintah pusat yang diatur dalam (Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 18 Tahun 2016, 2016), pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara merealisasikan program asuransi bagi nelayan sebagai bentuk jaminan sosial bagi masyarakatnya. Program tersebut dinamakan Bantuan Presmi Asuransi Nelayan (BPAN).

Upaya Pemerintah Kota Manado Menanggapi Pola Perubahan Mata Pencaharian Masyarakat Nelayan Sebagai Akibat dari Reklamasi Pantai Boulevard Kota Manado

Adanya kawasan reklamasi sebagai pusat perdagangan memberikan peluang kepada masyarakat untuk berinovasi dalam dunia perdagangan. Demikian halnya dalam aspek

perikanan, nelayan bukan lagi hanya sebagai penangkap ikan namun berpeluang sebagai pengelola ikan seperti usaha pembuatan Ikan roa, rica roa, ikan cakalang fufu, ikan kaleng dan olahan hasil tangkapan laut lainnya yang di jual di emperan jalan sampai di restoran kelas atas sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan nilai jual terhadap hasil tangkap nelayan. Kondisi penjualan olahan ikan khas Manado yang berada di Kecamatan Sario Kota Manado maupun produk-produk olahan ikan khas Manado yang dijual di toko-toko dan supermarket di daerah kawasan reklamasi di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Walaupun masyarakat nelayan didorong untuk memanfaatkan kesempatan melalui pekerjaan sampingan, pekerjaan sebagai nelayan terus ditingkatkan oleh pemerintah. Peningkatan kualitas nelayan terus didorong melalui berbagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat nelayan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Manado melakukan berbagai upaya seperti penyuluhan, pendampingan dalam pemberdayaan kelompok nelayan di Kota Manado untuk mensejahterakan masyarakat nelayan di Kota Manado, selain itu pemerintah juga rutin memberikan bantuan terhadap nelayan berupa 8 buah Rumpon Laut Dalam, 6 buah alat tangkap jaring soma pada tahun 2014. Pada tahun 2015 didistribusikan bantuan berupa 4 unit Perahu Pokmaswas, 3 unit kapal penangkap ikan 3 GT dan 40 unit *Coolbox Mini* 50 Kg. Selanjutnya 46 unit motor temple pada tahun 2016, dan 10 unit Meja Preparasi pada tahun 2016 (Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari bulan ke bulan hasil tangkapan ikan cenderung meningkat. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas nelayan menghasilkan hasil positif dan menguntungkan bagi masyarakat nelayan di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.

Harapan Masyarakat terhadap Pembangunan Reklamasi Pantai Boulevard

Berdasarkan hasil penelitian, harapan masyarakat nelayan terhadap pembangunan reklamasi yang telah di laksanakan di Kota Manado, dapat disimpulkan bahwa para nelayan membutuhkan perhatian dari pemerintah agar tanggap dalam memberdayakan nelayan dalam mensejahterakan rakyat melalui program-programnya.

Meskipun bantuan dan pemberdayaan terus dilakukan, ditemukan masih banyaknya anggota

nelayan yang merasa belum optimalnya kinerja pemerintah dalam memberdayakan nelayan. Sebagaimana diungkapkan pada wawancara yang dilakukan pada ketiga nelayan yang pada intinya adalah para nelayan masih membutuhkan perhatian pemerintah. hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa masyarakat nelayan masih merasa perlu ditingkatkannya kinerja pemerintah dalam hal mengelola dan menangani urusan kelautan dan nelayan.

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya nelayan yang bersikap apatis dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. sikap apatis tersebut disebabkan oleh pola pikir masyarakat nelayan yang merasa bahwa apabila nelayan terus menerima bantuan dan program-program pemberdayaan pemerintah, maka pemerintah akan dengan mudahnya melaksanakan reklamasi pantai hingga pada akhirnya tidak akan ada ruang lagi bagi para nelayan untuk dijadikan tambatan perahu serta akan berdampak pada kualitas air di laut sebagai tempat hidupnya ekosistem di laut.

Pembahasan Dampak Reklamasi Pantai Boulevard terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Kota Manado

Reklamasi diamalkan oleh Negara atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru.

Dari aspek tata guna, suatu wilayah tertentu perlu direklamasi agar dapat berdaya dan memiliki hasil guna. Aspek perekonomian adalah kebutuhan lahan akan pemukiman, semakin mahalnya daratan dan menipisnya daya dukung lingkungan di darat menjadikan reklamasi sebagai pilihan bagi Negara maju atau kota metropolitan dalam memperluas lahannya guna memenuhi kebutuhan pemukiman serta kebutuhan pengembangan kota. Dari aspek sosial, reklamasi bertujuan mengurangi kepadatan yang menumpuk di kota dan menciptakan wilayah yang bebas pengusuran karena berada di wilayah yang sudah disediakan oleh pemerintah dan pengembang, tidak berada di bantaran sungai maupun sempadan pantai. Aspek lingkungan berupa konservasi wilayah pantai, pada kasus tertentu di kawasan pantai karena perubahan pola arus air laut mengalami abrasi, ekresi ataupun erosi. Reklamasi dilakukan di wilayah pantai ini guna untuk

mengembalikan konfigurasi pantai yang terkena permasalahan tersebut ke bentuk semula.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan. Baik yang tinggal di kota maupun yang di desa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera lahir dan batin. Namun, dalam perjalanannya, kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera. Mulai dari pekerjaan kasar seperti buruh atau sejenisnya, sampai pekerjaan kantoran yang bisa sampai ratusan juta gajinya dilakukan oleh manusia. Kesejahteraan dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, taraf hidup yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera dari suatu masyarakat, kesejahteraan sosial pada umumnya meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.

Upaya Pemerintah Kota Manado Menanggapi Pola Perubahan Mata Pencaharian Masyarakat Nelayan Sebagai Akibat dari Reklamasi Pantai Boulevard Kota Manado

Pelaksanaan reklamasi pantai Boulevard yang pada tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, sekarang ini dipandang membawa dampak negatif bagi masyarakat nelayan. Nelayan sebagai pihak yang paling merasakan dampak dari reklamasi pantai merasakan bahwa reklamasi pantai telah membatasi ruang dan kesempatan mereka untuk mencari nafkah sebagai nelayan. Masalah tersebut mulai dari berkurangnya kawasan bagi tambatan perahu, kondisi laut yang telah mengalami pencemaran dan sebagainya. Peningkatan pembangunan yang telah terjadi di Kota Manado mendorong masyarakat termasuk kelompok nelayan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Melalui usaha secara mandiri maupun memanfaatkan lapangan kerja yang tersedia masyarakat nelayan memenuhi kebutuhannya dengan pekerjaan sampingan.

Berdasarkan (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan: meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Harapan Masyarakat terhadap Pembangunan Reklamasi Pantai Boulevard

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga), pemerintah bertanggung jawab dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga." Hal ini memberi petunjuk bahwa kedua komponen tersebut harus turut andil dalam mensejahterakan rakyat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Olehnya itu pemerintah terus melakukan upaya dalam memberdayakan nelayan.

Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban: menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan atau harga Garam yang menguntungkan bagi nelayan dan pembudi daya ikan atau petambak garam; melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut; melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan; dan memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan).

Terkait Jaminan Kepastian Usaha, mewajibkan kepada pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan ruangnya untuk memberikan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil. Artinya ada tanggungjawab pemerintah dalam penghidupan nelayan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian reklamasi Pantai Boulevard di Kota Manado memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan nelayan sebagai pihak yang paling merasakan dampak dari kebijakan. Upaya pemerintah Kota Manado dalam menanggapi pola perubahan mata pencaharian masyarakat nelayan di Kota Manado sebagai akibat dari reklamasi Pantai Boulevard adalah pemerintah mendorong masyarakat nelayan agar hasil tangkapan nelayan bisa diolah dan dijual sehingga memiliki nilai tambah. 3Harapan masyarakat terhadap Pembangunan reklamasi pantai yang telah dilakukan adalah agar pemerintah semakin memperhatikan masyarakat nelayan.

REFERENSI

Journal:

- Adi, I. R. (2013). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan)*. Rajawali Pers.
- Anandita, A., Soeaidy, M. S., & Hadi, M. (2013). Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Dinoyo Kota Malang. *Administrasi Publik*.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Kesejahteraan Rakyat*.
- Deviyanti, D. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. *EJournal Administrasi Negara*.
- Farida, U. (2017). *Analysis of Empowerment Program that was Implemented in Mamuju Regency East Sulawesi Indonesia*. 149(Icest), 19–21.
- Kadji, J. (2015). Pembangunan Masyarakat Sebagai Upaya Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Leboto. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 31–37.
- Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 18 Tahun 2016, (2016).
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, (1999).
- Prasodjo, T. (2016). Strategi Pembangunan Kualitas Manusia: Suatu Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 47–54.
- Samsir, A., Ma'ruf, M. I., & Salam, R. (2017). Impact of Income on Households Patterns of Consumption of Street Vendors in Makassar City. *8th International Conference of Asian Association of Indigenous and Cultural Psychology (ICAAIP 2017)*.

- Sari, F. M., & Ibrahim, M. (2009). Penerapan Manajemen Perubahan Dan Inovasi. *Administrasi Pembangunan*.
- Suharso, Y. (2014). Proses dan dampak urbanisasi. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, (2014).
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (2009).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2014).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, (2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, (2009).
- Urbanisasi Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan. (2012). *Humaniora*.
<https://doi.org/10.22146/jh.v13i3.734>
- Wenda, W. L., & Akib, H. (2015). Pembangunan Ekonomi dalam Era Otonomi Daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 43-51.